

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP APBD DI
JAWA TENGAH: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S1

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



Disusun Oleh :

Muhammad Rio Aryaza

NIM : 31401800112

**PROGAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian Skripsi

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP APBD DI JAWA
TENGAH: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

Disusun oleh :

Muhammad Rio Aryaza

NIM : 31401800112

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 16 Februari 2023

Pembimbing



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403012

**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP APBD DI
JAWA TENGAH: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**Disusun Oleh : Muhammad Rio Aryaza
NIM : 31401800112**

Telah di pertahankan di depan penguji
Pada tanggal 2 Maret 2023

Susunan Dosan Penguji

Pembimbing

Penguji



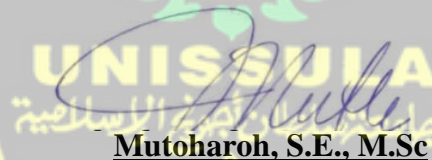
Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA

Dista Amalia Arifah, S.E., Akt., M.Si

NIK. 211403012

NIK. 211406020

Penguji



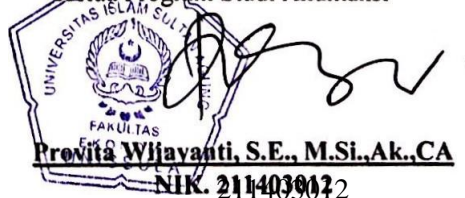
Mutoharoh, S.E., M.Sc

NIK.40014003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Akuntansi Tanggal

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Muhammad Rio Aryaza
NIM : 31401800112
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan penelitian untuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD Di Jawa Tengah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderating” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarisme* dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rio Aryaza

NIM. 31401800112

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rio Aryaza

NIM : 31401800112

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa skripsi yang **BERJUDUL PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP APBD DI JAWA TENGAH: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI VARIABEL MODERATING** merupakan hasil tulisan saya sendiri dan adalah benar keasliannya bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk pada daftar Pustaka. Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut baik sengaja ataupun tidak sengaja maupun tidak, saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rio Aryaza

NIM. 31401800112

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirahiim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia nikmat iman Islam. Sholawat dan salam juga penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang syafaatnya penulis nantikan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam, penulis akhirnya mampu menyelesaikan usulan penelitian dengan judul "Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD Di Jawa Tengah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderating", sebagai syarat meraih gelar sarjana di bidang akuntansi.

Usulan penelitian ini bisa penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak terutama dosen pembimbing yang sabar menuntun penulis. Selain kepada itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.

3. Seluruh dosen dan staf pengajar, civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
4. Bapak, Ibu dan Kakak handai taulan yang telah memberikan doa dan dukungan selama penulis berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.
5. Semua teman dan sahabat sejak semester satu hingga semester akhir yang selalu memberikan semangat dan saling mendorong satu sama lain termasuk teman dalam satu kelompok pembimbing bersama melalui proses melelahkan dalam penyusunan usulan penelitian ini.
6. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan usulan penelitian untuk skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa usulan penelitian untuk skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan. Penulis berharap semoga usulan skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca yang akan meneliti topik yang sama dan menjadikan peneliti menjadi lebih menghargai sebuah proses. Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 20 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rio Aryaza
NIM. 31401800112

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
Abstrak.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 <i>Goal Setting Theory</i>	13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.3 Wisatawan.....	18
2.1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
2.3 Pengembangan Hipotesis	27
2.4 Kerangka Penelitian.....	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Sumber Data Penelitian	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Populasi dan Sampel	33

3.5	Definisi Operasional Variabel	34
3.6	Metode Analisis Data	35
BAB IV		42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
4.1.1	Kondisi Geografis.....	42
4.1.2	Deskripsi Objek Penelitian.....	43
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif	44
4.3	Uji Asumsi Klasik	46
4.3.1	Uji Normalitas	46
4.3.2	Uji Multikoloniretas.....	47
4.3.3	Uji Heteroskedastis	48
4.3.4	Uji Autokorelasi	49
4.4	Uji Hipotesis	50
4.4.1	Koefisien Korelasi Regresi	50
4.4.2	Uji Koefisien Determinisasi (R ²)	52
4.4.3	Uji Statistik F.....	53
4.4.4	Uji Statistik t.....	53
4.5	Pembahasan.....	56
BAB V.....		61
PENUTUP.....		61
5.1	Kesimpulan	61
5.2	Implikasi.....	63
1.	Implikasi Teoritis	63
2.	Implikasi Praktis	64
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	65
5.4	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Wisatawan di Jawa Tengah 2015 - 2019	6
Tabel 1. 2 Jmlah PAD di Jawa Tengah 2015-2019.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4. 1 Jumlah data yang dapat digunakan untuk penelitian.....	44
Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskriptif	45
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov	47
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastis.....	48
Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi.....	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi.....	50
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien determinasi.....	52
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik F.....	53
Tabel 4. 10 Hasil Uji Statistik t.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Mekanisme Penyusunan APBD.....	22
Gambar 2. 2 Kerangka Penelitian.....	31



**PENGARUH JUMLAH WISATAWAN TERHADAP APBD DI JAWA
TENGAH: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI VARIABEL
MODERATING**

Muhammad Rio Aryaza

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Provita Wijayanti

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD di Jawa Tengah: Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel moderating. Variabel pada penelitian ini adalah jumlah wisatawan (X_1) sebagai variabel independen, APBD (Y) sebagai variabel dependen, dan Pendapatan Asli Daerah (M) sebagai variabel *moderating*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode penelitian Pustaka dan penelitian lapangan, yang dilakukan di kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Moderated Regression Analysis* melalui program SPSS 26 untuk windows.

Bukti empiris yang diperoleh dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel jumlah wisatawan terhadap PAD, variabel jumlah wisatawan, terhadap APBD, jumlah wisatawan terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel moderasi.

Kata Kunci: Jumlah wisatawan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), APBD

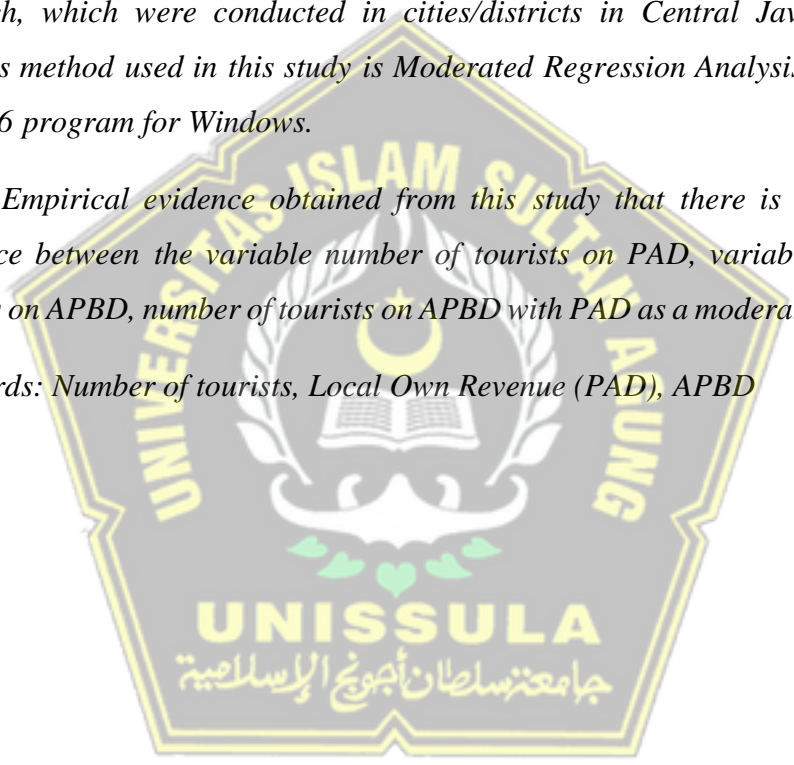
Abstract

This research aims to determine the effect of the number of tourists on the APBD in Central Java: Local Own Revenue as a moderating variable. The variables in this study are the number of tourists (X_1) as the independent variable, APBD (Y) as the dependent variable, and local revenue (M) as the moderating variable.

In this study, secondary data is used by library research methods and field research, which were conducted in cities/districts in Central Java. The data analysis method used in this study is Moderated Regression Analysis through the SPSS 26 program for Windows.

Empirical evidence obtained from this study that there is a significant influence between the variable number of tourists on PAD, variable number of tourists on APBD, number of tourists on APBD with PAD as a moderating variable.

Keywords: Number of tourists, Local Own Revenue (PAD), APBD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan pulau yang beraneka ragam alamnya dan penduduknya yang memiliki ratusan suku bangsa dengan seni budaya serta adat istiadat yang dimiliki beragam (Alyani & Siwi, 2020). Seharusnya keberagaman tersebut dapat dimanfaatkan lebih dengan maksud agar tujuan serta harapan dalam mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, dan juga dalam meningkatkan pendapatannya dapat terpenuhi yaitu dengan cara memanfaatkan segala potensi yang ada dengan cara seefektif dan seefisien mungkin.

Pemanfaatan segala potensi yang seefisien mungkin maka pembangunan nasional dapat tercapai seperti yang terkandung dalam UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dan fungsinya masing – masing dalam mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Fungsi pemerintah pusat menerapkan desentralisasi guna memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah daerah dalam menciptakan otonomi daerahnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah masing – masing.

Setiap daerah diberi hak untuk memperoleh sumber daya keuangan dalam bentuk kepastian ketersediaan dana pemerintah oleh urusan pemerintah yang diusulkan hal itu dijelaskan di dalam undang – undang no. 32 tahun (2004) tentang pemerintah daerah. Setiap daerah yang berada di wilayah Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing (Utary, 2021). Pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan pemerintahan merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan oleh negara untuk mengatur segala keperluan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan agar memberikan dampak positif dan berguna bagi suatu negara tersebut (Setiawan & Kurniasih, 2021). Pemerintah daerah semestinya dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif dalam menciptakan potensi pendapatan daerah, sehingga pendapatan yang sudah di targetkan akan terealisasi. Sumber penerimaan yang penting bagi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang komponennya terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Adanya desentralisasi diharapkan pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhannya dan mampu mengatur kepentingannya sendiri. Pengelolaan sumber - sumber pendapatan daerah mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber di dalam daerah itu sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terciptanya sumber pendapatan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuannya dalam

menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, terutama yang berasal dari PAD (Sutapa et al., 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2009), yaitu sumber keuangan daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai sumber penerimaan daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Peningkatan yang terjadi pada PAD memberikan efek pada investasi dari pemerintah sendiri, dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan pendapatan daerah yang kemudian digunakan sebagai salah satu komponen penyusunan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) merupakan daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Penyusunan APBD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah (Fatmawati & Ria Sari, 2021). APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sendiri terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Mekasisme penyusunan APBD berdasarkan pada UU No 17 tahun (2003) tentang keuangan negara sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
2. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan sebaliknya apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya.
3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati

Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam berjalannya penyusunan APBD, karena APBD bersumber dari perolehan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Salah satu aspek yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah yaitu memanfaatkan sektor pariwisata. Industri pariwisata diharapkan mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian nasional terutama pendapatan daerah.

Kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional dan daya serap lapangan kerja dalam sektor pariwisata merupakan salah satu bukti bagaimana pengaruh positif dari adanya pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia merupakan sektor industri yang sedang tumbuh dan berkembang. Segi kehidupan ekonomi nasional dengan

berkembangnya pariwisata akan menimbulkan banyak segi positif kemungkinan timbulnya industri kecil yang semuanya akan membawa kemakmuran bagi rakyat, sehingga dapat mengangkat bangsa Indonesia dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan yang lebih tinggi (Alyani & Siwi, 2020).

Adanya pariwisata, maka secara langsung akan mendatangkan berbagai dampak diantaranya dampak sosial, budaya dan ekonomi. Dari segi ekonomi dengan adanya pariwisata dapat membawa dampak secara langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung adanya industri pariwisata yaitu terciptanya lapangan kerja dan terciptanya pekerjaan di bidang pariwisata atau di lingkup tersebut, termasuk pemerintah daerah akan ikut andil dalam industri tersebut. Sedangkan dampak tidak langsung salah satunya yaitu meningkatkan permintaan transportasi menuju kawasan wisata. Sedangkan dampak berkelanjutan adanya pariwisata yaitu terciptanya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang bekerja.

Asumsi yang disampaikan oleh (Wahab, 2010) pada buku "Tourism Management" bahwa pariwisata merupakan bentuk industri baru yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cepat pada lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri – industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industri.

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting dalam perekonomian nasional. Pariwisata merupakan suatu proses perilaku seseorang yang sedang melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya dan

kembali ke titik semula (Judiseno, 2017). Jika dikembangkan dengan maksimal sektor pariwisata memberikan pengaruh yang besar, keberhasilan pengembangan sektor pariwisata memberikan pengaruh yang besar dalam penerimaan daerah. Perkembangan sektor pariwisata juga membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Selama para wisatawan menjalankan kegiatan berwisatanya wisatawan melakukan kegiatan konsumtif sehingga secara langsung membutuhkan barang dan jasa (Darsana, 2017).

Tabel 1. 1
Jumlah Wisatawan di Jawa Tengah 2015 - 2019

No	Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
1	2015	375.166	31.432.080	31 807 246
2	2016	578.924	36.899.776	37 478 700
3	2017	781.107	40.118.470	40 899 577
4	2018	677.168	48.943.607	49 620 775
5	2019	691.699	57.900.863	58 592 562

Sumber (BPS Jawa Tengah)

Berdasarkan tabel jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 daerah Jawa Tengah merupakan wilayah yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan, bisa dilihat dari table tersebut semakin tahun mengalami peningkatan kunjungan wisatawan. Daerah Jawa Tengah memiliki sumber daya yang dapat dikembangkan. Menurut Hanafi (2022) dalam meningkatkan potensi pariwisatanya, perlu dilakukan perancangan dan pembangunan wisata agar dapat lebih baik.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Provinsi Jawa Tengah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang terletak pada jalur

perlintasan antara Jawa Barat dengan Jawa Timur, sehingga banyak wisatawan lebih sering melewati Provinsi Jawa Tengah karena Provinsi Jawa Tengah hanya sebagai daerah perlintasan. Apabila para wisatawan bisa ditarik untuk menghabiskan waktunya di Provinsi Jawa Tengah meski dalam waktu sehari, sudah memiliki efek positif untuk pengembangan bisnis wisata. Dengan demikian, industri pariwisata merupakan salah satu sektor jasa sangat penting untuk dikembangkan. Sumber – sumber tersebut dihasilkan dari pajak, retribusi dan lain-lain yang telah disahkan.

Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak obyek wisata yang sangat menarik dengan beberapa bangunan kuno. Obyek wisata lain termasuk Puri Maerokoco (Taman Mini Jawa Tengah) dan Museum Rekor Indonesia (MURI). Salah satu kebanggaan di Provinsi Jawa Tengah adalah Candi Borobudur, yakni monumen Budha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9, terdapat di Kabupaten Magelang. Candi Mendut dan Pawon juga terletak satu kompleks dengan Candi Borobudur. Candi Prambanan di perbatasan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Di kawasan Dieng terdapat kelompok candi-candi Hindu, yang dibangun sebelum era Mataram Kuno. Kompleks candi Gedong Songo terletak di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Bagian Selatan Jawa Tengah juga menyimpan sejumlah objek wisata alam menarik, di antaranya Goa Jatijajar dan Pantai Karangbolong di Kabupaten Kebumen, serta Baturaden di Kabupaten Banyumas. Di bagian Utara terdapat objek wisata Guci di lereng Gunung Slamet Kabupaten Tegal, serta Kota Pekalongan yang dikenal dengan julukan Kota Batik.

Kawasan pantura barat banyak menyimpan wisata religi, seperti Masjid Agung Demak yang didirikan pada abad ke-16 merupakan bangunan artistik dengan paduan arsitektur Islam dan Hindu. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Serta di kawasan pantura barat juga terdapat 3 makam sunan wali, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus dan Sunan Muria.

Tabel 1. 2
Jumlah PAD di Jawa Tengah 2015-2019

No	Tahun	PAD
1.	2015	10.904.881.000.000
2.	2016	11.541.029.000.000
3.	2017	12.547.512.000.000
4.	2018	13.711.837.000.000
5.	2019	14.112.159.000.000

Sumber (*BPKAD Jawa Tengah.*)

Berdasarkan tabel pendapatan asli daerah tersebut dapat dilihat perolehan pendapatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan pendapatan daerah menandakan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat dimanfaatkan dari potensi yang ada dari setiap kota atau kabupaten yang ada di provinsi Jawa Tengah seperti pariwisata, agro bisnis (pertokoan), pendidikan dan lain - lain. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan yang diperoleh dari retribusi objek pariwisata merupakan penerimaan yang berasal dari retribusi karcis masuk serta pendapatan lainnya yang disahkan berasal dari objek pariwisata tersebut. Selain ketersediaan objek pariwisata yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisatawan untuk berkunjung di Jawa Tengah, sarana dan prasarana berupa hotel dan restoran merupakan faktor

pendukung untuk menarik wisatawan untuk berkunjung, selain itu akses jalan dan ketersediaan transportasi tidak luput dijadikan bahan pertimbangan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Jawa Tengah memiliki wisata dengan daya tarik wisata berupa objek wisata alam, museum, peninggalan sejarah, dan Kawasan industri. Dengan adanya berbagai macam pilihan wisata di kabupaten/kota tentunya akan mendongkrak pendapatan asli daerah.

Perkembangan pariwisata juga akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di wilayah tersebut, karena dengan pariwisata yang ada diharapkan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Selama wisatawan melakukan kegiatan wisata, para wisatawan akan berlaku konsumtif maka perputaran uang dan barang atau jasa yang ada akan semakin cepat, secara langsung para wisatawan akan membutuhkan barang dan jasa. Usaha pemenuhan permintaan wisatawan tersebut perlu dilakukan investasi pada bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lainnya, serta pada bidang rumah makan restoran. Jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi objek wisata di kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

Pengembangan potensi pariwisata di Kota/Kabupaten di Jawa Tengah maka perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah, pengelola atau perusahaan dan masyarakat agar pengembangan potensi pariwisata daerah bisa optimal. Hal itu dimaksudkan agar pengelolaan pariwisata yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sutapa et al., 2018) yang meneliti mengenai pengaruh moderasi pendapatan

asli daerah terhadap pengaruh jumlah wisatawan terhadap pendapatan daerah dan anggaran daerah. Hasil dari penelitian tersebut jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD, dan pengaruh jumlah wisatawan dengan APBD adalah positif, begitu juga dengan PAD sebagai variabel moderating. Penelitian ini juga pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan et al., 2022) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah” hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini memiliki kesamaan pada variabel yang digunakan yaitu jumlah wisatawan sebagai variabel independen, Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel moderating, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu dari segi tahun pengamatan, tempat penelitian dan metode analisis data yang digunakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian yang sekaligus menjadi judul penelitian ini, yaitu: **“Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD Di Jawa Tengah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2 Rumusan Masalah

Potensi perkembangan pariwisata semakin tahun semakin meningkat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemandirian pemerintah daerah untuk memperoleh sumber keuangan.

Di sisi lain, adanya berbagai macam bentuk wisata diharapkan mampu menjadi daya tarik dari Jawa Tengah, tetapi perlu adanya koordinasi antar *stakeholder* terkait guna menghidupkan perekonomian dari berbagai macam elemen masyarakat yang terlibat dan memberikan efek ke pemerintahan sendiri. Sehingga masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap APBD di kab/kota di Jawa Tengah dengan PAD sebagai variabel *moderating*”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Jawa?
2. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh jumlah wisatawan terhadap realisasi APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD sebagai variabel *moderating*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD sebagai variabel moderating.

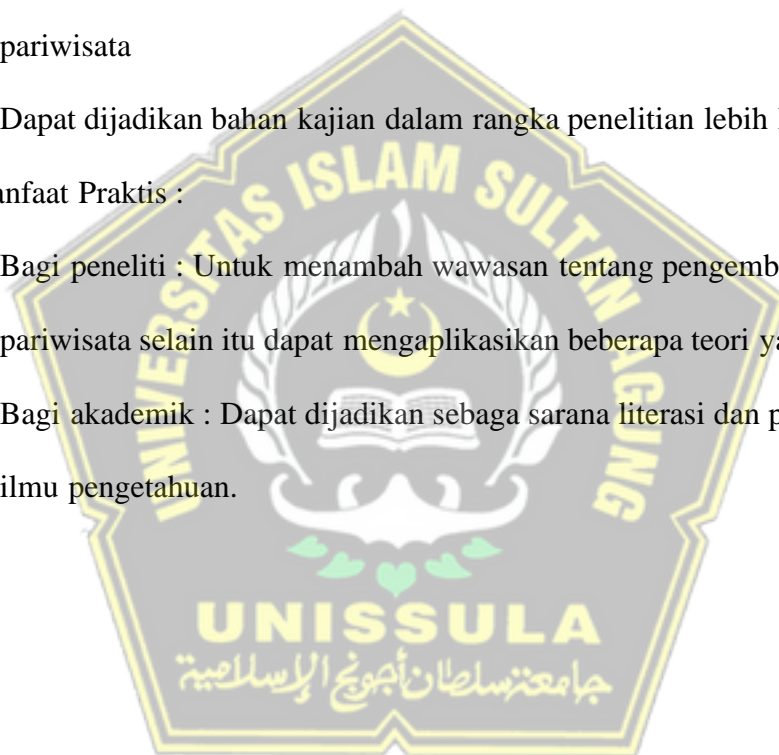
1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

1. Menambah khasanah pengetahuan tentang pengembangan industri pariwisata
2. Dapat dijadikan bahan kajian dalam rangka penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis :

1. Bagi peneliti : Untuk menambah wawasan tentang pengembangan industri pariwisata selain itu dapat mengaplikasikan beberapa teori yang ada.
2. Bagi akademik : Dapat dijadikan sebagai sarana literasi dan pengembangan ilmu pengetahuan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Goal Setting Theory

Goal setting theory dikembangkan oleh Locke sejak 1968 yang mulai menarik minat dalam berbagai isu organisasi. Berdasarkan *goal setting theory*, individu memiliki beberapa tujuan, akan memilih tujuan, dan termotivasi untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut (Haslindah et al., 2020).

Menurut teori ini salah satu karakteristik perilaku yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. Proses penetapan tujuan (*goal setting*) dapat dilakukan berdasarkan prakarsa sendiri/diwajibkan oleh organisasi sebagai satu kebijakan Wangmuba (2009). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Berdasarkan teori tersebut jumlah wisatawan dijadikan sebagai aspek yang menjadi acuan untuk mempertahankan kemampuan konstan, mengingat bahwa semakin tinggi tujuan atau acuan yang diperoleh maka semakin tinggi kinerja yang didapatkan. Pendapatan Asli Daerah dijadikan sebagai faktor acuan dari tujuan capaian yang ditargetkan yang akan mempengaruhi perolehan yang didapatkan di APBD pemerintah kota/Kabupaten di Jawa Tengah. Apabila faktor tersebut mampu dicapai maka tujuan yang sudah ditetapkan akan tercapai.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Utary, 2021) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun (2004) pada bab V (lima) nomor 1 (satu) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah terdiri atas :

A. Pajak daerah

Menurut (Ahmad, 2004) menyatakan bahwa Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh perorangan atau suatu badan kepala daerah tanpa adanya imbalan langsung yang didapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Pemerintah daerah, pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua kategori yaitu: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan Undang – undang No 34 tahun (2000) tentang perubahan atas Undang – undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Jenis – jenis pajak Provinsi terdiri dari :

- A. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- B. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- C. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- D. Pajak pengambilan dan pemandaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Menurut UU no 28 tahun (2009) pajak kabupaten atau kota dibagi menjadi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang

burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak daerah sendiri memiliki peranan ganda meliputi:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*).
- b. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Adapun karakteristik pajak daerah yaitu :

- a) Pemungutan pajak daerah didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang – Undang.
 - b) Peungutan pajak daerah hanya sebatas wilayah administrasi yan dikuasai.
 - c) Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diberikan kepada daerah yang kemudian beralih menjadi pajak daerah.
 - d) Pajak daerah berfungsi untuk membiayai pengeluaran atau urusan pemerintah daerah.
 - e) Pajak berfungsi untuk pengatur anggaran negara.
- B. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang no 28 tahun (2009) adanya retribusi daerah atau pajak dapat memberikan keuntungan daerah dari sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain harus adanya penghapusan beberapa sumber pendapatan asli daerah karena tidak diperkenankan untuk dipungut oleh daerah terutama beberapa sumber yang diperoleh dari retribusi daerah. Adapun beberapa kaarakteristik retribusi daerah :

- a. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) seperti Peraturan Daerah (Perda), dan dinas yang mengelola dan memungut retribusi adalah Dinas Pendapatan Daerah (dispenda).
- b. Dalam pelaksanaan retribusi daerah bersifat memaksa secara ekonomis bagi wajib retribusi yang sudah memenuhi syarat UU dan Perda.
- c. Orang pribadi atau badan yang dikenakan retribusi akan mendapatkan balas jasa langsung setelah membayar retribusi.
- d. Retribusi daerah dibebankan kepada wajib retribusi yaitu orang atau badan yang menggunakan pelayanan publik atau jasa pemerintah daerah yang sudah disediakan.

Menurut UU no 28 tahun (2009) ada 30 jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah yang akan digolongkan ke dalam 3 golongan retribusi, diantaranya :

- a) Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat secara umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun oleh badan.
- b) Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk kepentingan komersial, meliputi pelayan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
- c) Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap badan atau orang pribadi dengan

maksud untuk mengatur pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi maupun badan.

Menurut (Siahaan, 2013) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu atau khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Undang-Undang no 33 tahun (2004) menyatakan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara atau BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Pendapatan yang sah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu dari hasil penjualan aset tetap negara dan jasa giro. Menurut (Widjaya, 2007) menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan menurut bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah.

D. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Menurut Pada UU Pasal 6 No. 33 Tahun (2004) tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- b. Jasa giro,

- c. Pendapatan bunga,
- d. Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah (Baldrick, 2017)

2.1.3 Wisatawan

Menurut Undang – Undang No 10 tahun (2009) pasal 1, wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Dengan adanya kegiatan wisata atau dengan adanya orang yang berkunjung ke suatu daerah maka bisa dijadikan salah satu bukti bahwa daerah tersebut memiliki daya Tarik wisata yang cukup besar. Menurut (Nawawi, 2003) menyatakan adapun beberapa manfaat jika banyak wisatawan mengunjungi suatu tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah setempat

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau suatu daerah tertentu. Menurut organisasi wisata dunia (WTO) wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal selama enam bulan di

tempat tersebut (Ginting et al., 2018). Beberapa klasifikasi wisatawan menurut Pacific Area Travel Association (PATA) meliputi :

1. Orang yang melakukan perjalanan untuk bersenang – senang, untuk keperluan pribadi, atau untuk keperluan kesehatan.
2. Orang yang melakukan perjalanan untuk kepentingan badan atau organisasi.
3. Orang yang melakukan perjalanan dengan kepentingan bisnis.

Wisatawan memiliki tujuan untuk mengunjungi sebuah daerah dan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, ada beberapa karakteristik dan jenis wisatawan meliputi:

1. Wisatawan lokal (*local tourist*)

Wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke daerah atau tujuan wisata, wisatawan berasal dari dalam negeri.

2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*)

Wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke daerah tertentu tujuan wisata, wisatawan berasal dari luar negeri.

3. *Holiday tourist*

Wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah tujuan wisata tertentu dengan maksud untuk bersenang – senang atau untuk berlibur tanpa adanya kepentingan lain.

4. *Business tourist*

Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk keperluan bisnis atau urusan pekerjaan.

5. *Individual tourist*

Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata secara sendiri.

6. *Common interest*

Wisatawan yang pergi ke suatu daerah tujuan wisata dengan tujuan tertentu, seperti untuk pendidikan atau mengunjungi sanak saudara atau keperluan yang lainnya.

7. *Group tourist*

Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata secara berkelompok.

2.1.4 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Permendagri no 13 tahun (2006), APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 januari sampai dengan 31 desember. Menurut Undang-undang nomer 17 Tahun (2003) pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dicatat dalam APBD.

a. Struktur APBD

Struktur APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan, berikut beberapa struktur APBD :

1. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan yang sah. Sedangkan jenis pendapata terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

2. Belanja daerah

Belanja daerah dapat diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi dan jenis belanjanya. Belanja daerah yaitu satu kesatuan dalam penggunaan anggaran dalam keperluan tertentu seperti DPRD dan sekretariat DPRD, serta dinas dan lembaga teknis daerah lainnya yang terkait. Fungsi dari belanja daerah yaitu untuk pendidikan, kesehatan dan dalam fungsi – fungsi lainnya. Jenis belanja yang dimaksud meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal atau pembangunan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan dapat diklasifikasikan menurut sumber pembiayaannya. Sumber pembiayaan daerah yang termasuk ke dalam penerimaan daerah antara lain sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Kemudian sumber penerimaan daerah yang termasuk kedalam pengeluaran daerah seperti pembayaran hutang pokok.

b. Mekanisme Penyusunan APBD

Mekasisme penyusunan APBD berdasarkan pada UU No: 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai berikut:



Gambar 2.1
Mekanisme Penyusunan APBD

Adapun langkah-langkah penyusunannya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
2. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah, dan sebaliknya apabila DPRD tidak setuju maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya.

3. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 24, “Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran belanja dan pendapatan daerah entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu”. Menurut (Nordiawan, 2012) realisasi anggaran pendapatan dan belanja adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat dan daerah), dalam satu periode pelaporan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Dampak Jumlah Wisatawan terhadap APBD Periode Covid-19 Di Jawa Tengah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Variabel Moderating, telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berikut beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Peneliti	Variabel	Objek Pengamatan	Hasil Penelitian
1.	(Sutapa et al., 2018)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wisatawan <p>Variabel terikat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • APBD <p>Variabel Moderating :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD 	Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali dari tahun 2008 – 2017.	Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD, dan pengaruh jumlah wisatawan dengan APBD adalah positif, begitu juga dengan PAD sebagai variabel moderating.
2.	(Ramadhan et al., 2022)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD <p>Variabel terikat APBK</p>	Penerimaan PAD dan APBK di Kabupaten Bener Meriah 2005 – 2014.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bener Meriah berpengaruh secara signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Bener Meriah.
3.	(Swantara & Darsana, 2017)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Wisatawan • Pendapatan Sektor PHR <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD <p>Variabel Intervening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan retribusi objek wisata 	Kunjungan wisatawan, pendapatan sektor PHR, penerimaan retribusi obyek wisata, dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar selama periode tahun 1995-2014.	Kunjungan wisatawan tidak memiliki pengaruh positif terhadap PAD.

4.	(Ginting et al., 2018)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kunjungan wisata <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah 	Objek wisata di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara	Jumlah wisatawan secara langsung berpengaruh positif terhadap PAD.
5.	(Tobing, 2021)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah objek wisata • Tingkat hunian kamar • Jumlah kunjungan wisatawan <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD 	Wisatawan yang berkunjung di objek wisata Kabupaten Simalungun	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Simalungun.
6.	(Rizal & Erpita, 2019)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal 	Pendapatan asli daerah dan belanja daerah Kota Langsa dari tahun 2006-2017	PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa.
7.	(Fatmawati & Ria Sari, 2021)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja daerah 	Pemerintah Kota yang memiliki kelengkapan data laporan keuangan APBD yang dibutuhkan oleh penulis selama periode 2016-2019	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
8.	(Dermawan, 2018)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belanja daerah 	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 sampai 2016 Kota/Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2014-2016 berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di kota/Kabupaten

			Provinsi Jawa Barat	provinsi Jawa Barat.
9.	(Ali et al., 2020)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kunjungan wisatawan <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah <p>Variabel intervening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak hotel 	Jumlah kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan	Kunjungan wisatawan dan pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bintan periode 2015-2019. Kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap pajak hotel pada Kabupaten Bintan periode 2015-2019. Dan jumlah kunjungan wisatawan secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
10.	(Alyani & Siwi, 2020)	<p>Variabel bebas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah objek wisata • Jumlah hotel <p>Variabel terikat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAD 	Jumlah objek wisata, jumlah hotel dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Jumlah objek wisata dan jumlah hotel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Perumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Jumlah Wisatawan Terhadap APBD di Jawa Tengah dengan PAD sebagai Variabel Moderating. Berdasarkan pemikiran tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah wisatawan Terhadap PAD

Perkembangan sektor pariwisata tentunya terpengaruh dari respon wisatawan, dapat diartikan bahwa kehadiran wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata sangatlah memberikan efek yang cukup signifikan. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor pariwisata di setiap daerah (Hanafi Ahmad, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan (Sutapa & Miati, 2018) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD. Sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 = Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

2. Pengaruh Jumlah wisatawan Terhadap APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan sarana dan alat yang ada pada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tanggung jawabnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja bersumber dari pendapatan asli daerah (Ramadhan et al., 2022).

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat dan daerah), dalam satu periode pelaporan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun (2003).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sutapa & Miati, 2018) bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD. Atas dasar penelitian yang sudah dilakukan maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan :

H2 = Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

3. Pengaruh PAD Terhadap APBD

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah akan membawa suatu konsekuensi logis, bahwa tiap daerah harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan pemenuhan kebutuhan untuk membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Fatimah et al., 2020). Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk mengembangkan daerah, serta isi di dalam daerah tersebut, dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut , sehingga pemerintah pusat memiliki kesempatan untuk mempelajari, memahami, dan menanggapi berbagai kecenderungan global dan

memanfaatkannya. Kebijakan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pertama bertujuan untuk menyelaraskan dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Kedua, meminimalkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical balance*). Ketiga, mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kapasitas keuangan (*horizontal balance*). Keempat, meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan keenam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokrasi).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ramadhan et al., 2022) pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain – lain. Semakin tinggi perolehan pendapatan yang didapatkan semakin bertambah sumber pendapatan dari daerah, dan mempengaruhi realisasi APBD dari daerah tersebut. Atas dasar penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

4. Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD Dengan PAD sebagai Variabel *Moderating*

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dapat diperoleh oleh daerah dengan mengandalkan sumber-sumber yang ada pada daerahnya sendiri, pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan (Rizal & Erpita, 2019)

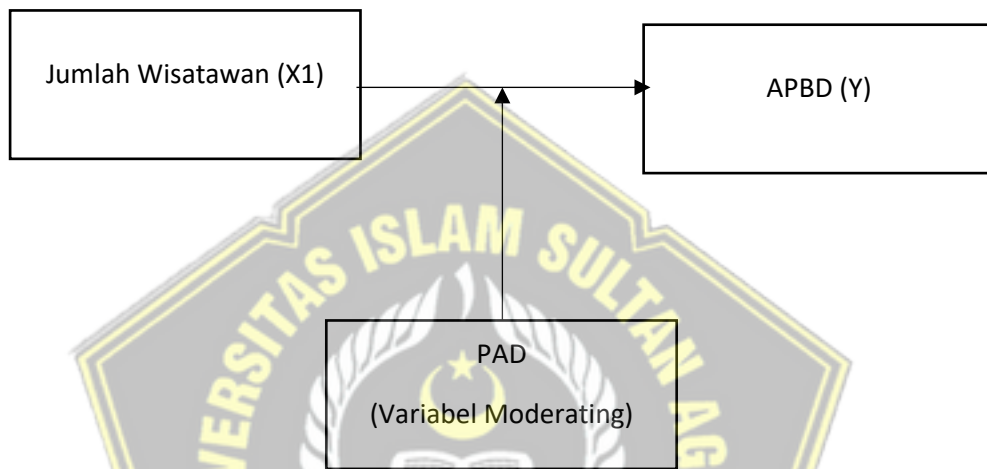
kepada daerah dalam menggali pendanaan. PAD dapat menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah dalam mendapatkan perolehan pendapatan yang bersumber dari daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Pendapatan yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah yaitu pemanfaatan sektor pariwisata, pengaruh dari kunjungan wisatawan akan memberikan efek terhadap penerimaan daerah, karena dengan adanya wisatawan yang berkunjung akan mempengaruhi retribusi yang ada di tempat wisata tersebut, kemudian menambah pendapatan.

Kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pendapatan daerahnya sendiri adalah salah satu indikator kemandirian suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila dapat mengurusinya sendiri tanpa melibatkan campur tangan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sutapa & Miati, 2018) menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD. Atas dasar penelitian tersebut maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H4 = Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD sebagai variabel moderating.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 2

Kerangka Penelitian Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD Di Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Variabel Moderating

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafah positivisme, metode kuantitatif digunakan untuk meneliti pada sampel atau populasi tertentu, dengan pengumpulan data yang dilakukan menggunakan instrument penelitian atau analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Bungin, 2011).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan mengacu pada literatur (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, catatan, ataupun laporan dari penelitian terdahulu. Data penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan BPS Jawa Tengah.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data penelitian ini bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan BPS Jawa Tengah, selain itu bersumber dari akses melalui internet.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh pada penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian Pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian Pustaka digunakan untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan. Penelitian dengan metode ini memperoleh data yang berkaitan dapat melalui buku, jurnal, majalah, tesis, ataupun dapat melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang diperoleh bersumber dari Laporan yang ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ataupun di BPS Jawa Tengah dari tahun 2020 samapi dengan tahun 2021.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah general yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat menghasilkan kesimpulan. Sementara menurut (Arikunto, 2006) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok elemen baik itu secara individual, objek atau dalam peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik yang sudah ditetapkan oleh peneliti menjadi target general untuk dipelajari dan dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah data yang

diperoleh oleh peneliti dan yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah yaitu jumlah wisatawan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti atau juga bisa didefinisikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti. Dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan harus betul-betul mewakili bagian dari populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini mengambil sampel dengan 6 kota dan 29 kabupaten dari tahun 2015-2019.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat diberikan berbagai macam nilai. Tipe variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini ada tiga jenis yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderating. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah wisatawan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Adapun variabel yang dijadikan objek penelitian akan didefinisikan sebagai berikut :

Tabel 3. 1**Definisi Operaasional Variabel**

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Jumlah Wisatawan	Jumlah wisatawan adalah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah, baik domestik maupun mancanegara. data diperoleh melalui hasil sensus BPS Provinsi Jawa Tengah.	Jumlah kunjungan wisatawan selama 2015-2019	Rasio
2.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. data yang digunakan adalah jumlah PAD yang diperoleh melalui hasil laporan keuangan daerah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rasio
3.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat ukur menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. (Mardiasmo, 2009)	1. Realisasi pendapatan daerah 2. Realisasi Belanja daerah	Rasio

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan metode analisis linier berganda.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel – variabel penelitian, baik itu variabel independent, variabel dependen, maupun variabel moderating. Analisis deskripsi mampu memberikan deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari masing – masing variabel yang ada. Pengukuran rata – rata (mean) merupakan cara yang dapat digunakan dan yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari distribusi suatu data. Sedangkan standar deviasi sendiri merupakan perbedaan yang muncul dari nilai data yang diteliti dengan nilai rata-rata dari data tersebut.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik maka perlu dilakukan beberapa hal terlebih dahulu diantaranya uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastis dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dilakukan dengan membuat hipotesis nol (H_0) untuk data berdistribusi normal dan hipotesis alternatif (H_A)

untuk data tidak berdistribusi normal. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.05.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai korelasi $> 0,80$ maka H_0 ditolak, sehingga ada masalah multikolinieritas.
2. Jika nilai korelasi $< 0,80$ maka H_0 diterima, sehingga tidak ada masalah multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastis

Uji heterodastis bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Dalam pengamatan ini dapat dilakukan dengan cara uji Glejser. Uji Glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregres absolut residual. Dasar pengambilan keputusan dengan uji glejser adalah:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2015). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi liner ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan cara uji Durbin-Waston (DW test), uji durbin-waston hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Berikut ini adalah dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi: Pengambilan keputusan pada uji Durbin –Watson adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau *upper bound* (du) dan ($4 - du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar daripada ($4 - dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara ($4 - du$) dan ($4 - dl$), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis sendiri dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh dari jumlah wisatawan terhadap APBD kota/Kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD sebagai variabel moderating. Regresi sendiri digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Kemudian dengan Moderated Regression Analysis (MRA) dapat digunakan untuk mengetahui gambaran pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD kota/Kabupaten di Jawa Tengah.

Rumus yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda (multiple linear regression) :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Realisasi APBD

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi

X1 = Jumlah wisatawan

X2 = PAD

X1 X2 = Interaksi antara jumlah wisatawan dengan PAD

E = Error Term, Yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Dalam uji hipotesisi ini dapat dilakukan melalui :

a. Koefisien Korelasi Regresi

Pengujian koefisien relasi menurut (Ghozali, 2018) adalah uji yang digunakan untuk mencari apakah ada hubungan dan

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila kedua variabel berbentuk interval atau ratio.

b. Uji Koefisien Determinisasi (R^2)

Koefisien (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi varian dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2018).

c. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dalam uji statistik F sebagai berikut :

1. Jika nilai PAD lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, hal ini dapat menyimpulkan bahwa variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai PAD lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dapat menyimpulkan bahwa variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

d. Uji Statistik t

Uji statistic t sendiri dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan dapat digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan pada uji statistik t meliputi :

- 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini berarti bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dapat mengartikan bahwa variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

4. Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis)

Tujuan dari analisis regresi moderasi yaitu untuk mengetahui apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Analisis yang digunakan untuk menguji tersebut adalah analisis linier berganda dengan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD serta apakah variabel PAD mampu memoderasi pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa, dengan ibu kota provinsi Jawa Tengah yaitu berada di Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan Jawa Barat di sebelah barat, Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayah provinsi Jawa Tengah sebesar 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa.

Secara astronomi, Provinsi Jawa Tengah terletak pada 50 40' sampai 8° 30' LS dan 108° 30' sampai 111° 30' BT (termasuk pulau karimun jawa), memiliki suhu rata-rata berkisar antara 23,9 °C sampai 28,2 °C dan memiliki kelembaban udara cukup tinggi yaitu mencapai 69-83 %. Secara geologi, seperti wilayah Indonesia pada umumnya, Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda dunia sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif. Dari sebelas gunung besar yang ada di Jawa Tengah, enam diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Slamet, Sumbing, Sindoro, Merbabu, Merapi, dan Gunung Ungaran. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 kabupaten/kota, yaitu terdiri dari 29 kabupaten dan sisanya kota.

4.1.2 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah daerah yang ada di Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota yang menjadi populasi dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten dan kota, meliputi :

1. Kabupaten Banjarnegara
2. Kabupaten Banyumas
3. Kabupaten Batang
4. Kabupaten Blora
5. Kabupaten Boyolali
6. Kabupaten Brebes
7. Kabupaten Cilacap
8. Kabupaten Demak
9. Kabupaten Grobogan
10. Kabupaten Jepara
11. Kabupaten Karanganyar
12. Kabupaten Kebumen
13. Kabupaten Kendal
14. Kabupaten Klaten
15. Kabupaten Kudus
16. Kabupaten Magelang
17. Kabupaten Pati
18. Kabupaten Pekalongan
19. Kabupaten Pemasang
20. Kabupaten Purbalingga
21. Kabupaten Purworejo
22. Kabupaten Rembang
23. Kabupaten Semarang
24. Kabupaten Sragen
25. Kabupaten Sukoharjo
26. Kabupaten Tegal
27. Kabupaten Temanggung
28. Kabupaten Wonogiri
29. Kabupaten Wonosobo
30. Kota Magelang
31. Kota Pekalongan
32. Kota Salatiga
33. Kota Semarang
34. Kota Surakarta
35. Kota Tegal

Data penelitian ini (N) diperoleh dari total keseluruhan kota/Kabupaten di Jawa Tengah yaitu 35 kota/Kabupaten dengan rentang tahun dari 2015-2019 sehingga secara keseluruhan sebanyak 175, data tersebut diperoleh dari laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2019 yang disampaikan secara keseluruhan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015-2019. Setelah dilakukan seleksi data, kemudian dilakukan uji *outliers* dengan menggunakan uji Q-Q Plot. Data outliers adalah data yang menyimpang terlalu jauh dari data yang lainnya dalam satu rangkaian data. Data outliers yang memiliki karakteristik unik dihilangkan agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini.

Tabel 4. 1
Jumlah data yang dapat digunakan untuk penelitian

Prosedur Penentuan Data	Jumlah
1. Laporan Realisasi APBD 2015-2019	175
2. Data <i>outliers</i>	(16)
Total data yang dapat digunakan	159

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi dari data yang tersedia, analisis tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian meliputi variabel independen (X) yaitu jumlah wisatawan, variabel dependen (Y) yaitu realisasi APBD, dan variabel moderating yaitu pendapatan asli daerah. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Berikut hasil analisis statistik deskriptif.

Tabel 4. 2
Hasil Uji Deskriptif

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah Wisatawan (X1)	159	50.686	4.260.566	1.161.115	951.981
PAD (X2)	159	152.044.596.332	1.491.645.900.065	333.066.377.217	153.092.726.512
Interaksi Jumlah wisatawan dan PAD (X1.M)	159	1.455.112.864.055	466.168.729.194.543	4.427.395.362.546	591.395.245.611
Realisasi APBD (Y)	159	750.581.558.962	4.103.151.795.483	2.044.629.314.537	580.558.510.254

Berdasarkan hasil uji deskriptif menunjukkan jumlah sampel sebanyak 159. Hasil analisis statistic deskriptif dari sampel realisasi APBD (Y) mempunyai nilai mean 2.044.629.314.537, standar deviasi 580.558.510.254, nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 750.581.558.962 dan 4.103.151.795.483. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan realisasi APBD rata-rata dari tahun 2015-2019 sebesar 2.044.629.314.537. Nilai realisasi APBD terendah yaitu sebesar 750.581.558.962 di kota Salatiga pada tahun 2015, sedangkan nilai realisasi APBD tertinggi berada di Kota Semarang pada tahun 2016 dengan jumlah realisasi APBD sebesar 4.103.151.795.483.

Variabel jumlah wisatawan mempunyai nilai mean 1.161.115, standar deviasi 951.981, nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 50.686 dan 4.260.566. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan wisatawan di kota/Kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2015-2019 sebesar 1.161.115. Kunjungan wisatawan paling kecil di kota/kabupaten di Jawa Tengah sebesar 50.686 di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015, sedangkan kunjungan wisatawan tertinggi sebesar 4.260.566 wisatawan di Kabupaten Magelang pada tahun 2015.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai mean 333.066.377.217, standar deviasi 153.092.726.512, nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 152.044.596.332 dan 1.491.645.900.065. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota/Kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2015-2019 sebesar 333.066.377.217. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling kecil di kota/kabupaten di Jawa Tengah sebesar 152.044.596.332 di Kota Pekalongan pada tahun 2015, sedangkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi sebesar 1.491.645.900.065 di Kota Semarang pada tahun 2016.

Variabel interaksi hubungan jumlah wisatawan dengan PAD (X1.M) mempunyai nilai mean 4.427.395.362.546, standar deviasi 591.395.245.611, nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 1.455.112.864.055 dan 466.168.729.194.543. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata interaksi yang terjadi antara jumlah wisatawan dengan PAD di kota/Kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2015-2019 sebesar 4.427.395.362.546. Nilai X1.M terkecil yaitu sebesar 1.455.112.864.055 di Kota Pekalongan pada tahun 2015, sedangkan interaksi yang terjadi antara jumlah wisatawan dengan PAD paling tinggi sebesar 466.168.729.194.543 di Kota Semarang pada tahun 2016,

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk apakah data terdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan grafik. Normal tidaknya data dapat dideteksi juga level plot

grafik histogram. Uji normalitas dengan menggunakan alat uji analisis metode Kolmogorov Smirnov. Berikut tabel hasil uji metode *Kolmogorov Smirnov*.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

Nilai Asymp. Sig (2-tailed)	Taraf Signifikansi	Keterangan
0.97	0.05	Normal

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Dengan dasar apabila probabilitas (sig) > 0,05 maka data telah terdistribusi dengan normal. Maka berdasarkan pengujian dengan SPSS 26 menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi sebesar 0.097 maka nilai $0.097 > 0.05$, mengartikan data tersebut terdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikoloniretas

Uji multikolinieritas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas dalam sebuah model regresi berganda. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikoloniretas

Variabel	Collinearity Tolerance	Statistic VIF
Jumlah wisatawan	0.545	1.834
PAD	0.497	2.012
X1.M	0.321	3.116

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel uji multikolinearitas didapatkan nilai dari masing-masing variabel memperoleh hasil kurang dari 0.10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada antar variabel independen dalam model regresi ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastis

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Tabel 4. 5
Hasil Uji Heteroskedastis

Model	t	Sig.
Jumlah Wisatawan	-2.096	0.077
PAD	-2.989	0.059
x1.m	2.818	0.055

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *glesjer* menghasilkan bahwa nilai Sig. dari masing-masing variabel adalah sebesar 0.077 untuk variabel jumlah wisatawan, 0.059 untuk variabel Pendapatan Asli Daerah, dan sebesar 0.055 untuk variabel X1.m. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan, atau nilai Sig. lebih besar dari 0.05.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$). Beberapa uji statistik yang sering digunakan adalah uji Durbin-Watson, atau uji dengan run test. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada data.

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

1. Bila nilai DW berada di antara $4 - d_u$ sampai dengan $4 - d_l$, koefisien autokorelasi akan sama dengan nol. Artinya, tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih kecil dari pada $4 - d_u$, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya, ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW terletak di antara d_L dan d_u , berarti tidak dapat disimpulkan.
4. Bila nilai DW lebih besar daripada $4 - d_L$, koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya, ada autokorelasi negative.
5. Bila nilai DW terletak di antara $4 - d_u$ dan $4 - d_l$, berarti tidak dapat disimpulkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kriteria pengambilan keputusan terkait ada tidaknya autokorelasi diperlukan syarat perhitungan menggunakan Tabel Durbin Watson (DW). Diketahui bahwa jumlah sampel $N = 159$ dan jumlah variabel independen sebanyak 2 variabel, dari sini diperoleh nilai d_u sebesar 1.7662. Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel 4.6 terlihat bahwa nilai

DW adalah sebesar 1.873, nilai ini berada di atas batas du yakni 1.7662 dan kurang dari (4-du) yaitu sebesar 2,2338, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Autokorelasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	D-W
0.741 ^a	0.649	0.640	143890.555	1.873

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam kriteria pengambilan keputusan terkait ada tidaknya autokorelasi diperlukan syarat perhitungan menggunakan Tabel Durbin Watson (DW). Diketahui bahwa jumlah sampel $N = 159$ dan jumlah variabel independen sebanyak 2 variabel, yaitu jumlah wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sini diperoleh nilai du sebesar 1.7662. Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel 4.6 terlihat bahwa nilai DW adalah sebesar 1.873, nilai ini berada di atas batas du yakni 1.7662 dan kurang dari (4-du) yaitu sebesar 2,2338, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Koefisien Korelasi Regresi

Tabel 4. 7
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Signifikansi
	B	Std. Error		
Constant	-13824073.429	1336785.010	-10.341	0.000
Jumlah wisatawan	114906.537	40030.966	0.210	0.005
PAD	1271226.882	111333.876	0.874	0.000
X1.M	1.198E-13	0.000	0.334	0.001

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Dari tabel diatas, nilai-nilai yang tertera digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi berikut ini:

Realisasi APBD $Y = 1.382 + (210)X_1 + (874)X_2 + (334)X_{1.M} + e$ atau Realisasi APBD = -1.382 + (210)Jumlah Wisatawan + (874)Pendapatan Asli Daerah + (334)Interaksi jumlah wisatawan dengan PAD + e.

Keterangan:

- Konstanta sebesar -1.382 menyatakan bahwa apabila variabel jumlah wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keadaan konstan (tetap), maka nilai Realisasi APBD sebesar -1.382 satu satuan.
- Koefisien regresi Jumlah wisatawan (X_1) sebesar (0.210) menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan jumlah wisatawan maka akan menaikkan realisasi APBD sebesar 0.210 satu satuan (karena bertanda positif). Dan begitu pula sebaliknya, penurunan satu satuan jumlah wisatawan maka akan menurunkan realisasi APBD sebesar 0.210 satu satuan.
- Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X_2) sebesar (0.874) menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan menaikkan realisasi APBD sebesar 0.484 satu satuan (karena bertanda positif).

Dan begitu pula sebaliknya, penurunan satu satuan Pendapatan Asli Daerah maka akan menurunkan realisasi APBD sebesar 0.874 satu satuan.

- d) Koefisien regresi hubungan interaksi jumlah wisatawan dengan PAD (X1.M) sebesar (0.334) menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan maka akan menaikkan realisasi APBD sebesar 0.334 satu satuan (karena bertanda positif). Dan begitu pula sebaliknya, penurunan satu satuan maka akan menurunkan realisasi APBD sebesar 0.874 satu satuan.
- e) Tanda positif menandakan hubungan yang searah antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), sedangkan tanda negatif menandakan hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.741 ^a	0.649	0.640	143890.555

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel uji koefisien determinasi, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dalam R Square adalah sebesar 0.649, yang berarti kemampuan variabel penjelas dalam menerangkan variabel respon sebesar 64,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 35,1 % dipengaruhi variabel lain di luar model regresi.

4.4.3 Uji Statistik F

Tabel 4. 9

Hasil Uji Statistik F

	Sum of Squares	df	Mean	F	Sig.
Regression	3902863988937.798	3	1300954662979.266	62.834	0.000 ^b
Residual	3209196223535.981	155	20704491764.748		
Total	7112060212473.778	158			

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel uji f dapat diketahui nilai signifikansi 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah wisatawan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi APBD secara simultan. Sehingga model regresi dalam penelitian ini layak.

4.4.4 Uji Statistik t

Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Untuk itu statistik uji yang digunakan adalah statistik uji t atau t-test. Kriteria pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Atau dapat pula dengan melihat p-value.
 - a. Jika $Sig > 0.05$ maka hipotesis tidak teruji.
 - b. Jika $Sig < 0.05$ maka hipotesis teruji.

Pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel, yaitu jumlah wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi APBD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	Keterangan	B	Sig.	Keputusan
H1	Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah	0.130	0.000	Diterima
H2	Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.	114906.537	0.005	Diterima
H3	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.	1271226.882	0.000	Diterima
H4	Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dengan PAD sebagai variabel moderating.	1.1989	0.001	Diterima

Sumber : Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas berikut adalah pengujian hipotesis pada penelitian ini :

1. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengujian hipotesis yang pertama adalah pengujian jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 0.130 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut

mengartikan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka hipotesis jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) **diterima**, Karena memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pengaruh jumlah wisatawan terhadap APBD

Pengujian hipotesis yang kedua adalah pengujian jumlah wisatawan terhadap APBD. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 114906.537 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0,005 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut mengartikan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka hipotesis jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD **diterima**, Karena memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD.

3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD

Pengujian hipotesis yang ketiga adalah pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 1271226.882 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD. Dengan demikian H_a diterima dan H_0 ditolak, maka hipotesis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap APBD **diterima**, Karena memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD.

4. Pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel *moderating*

Pengujian hipotesis yang keempat adalah pengujian jumlah wisatawan terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel moderating. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 1.1989 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0.001 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil tersebut mengartikan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel moderating. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, maka hipotesis jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel moderating **diterima**, Karena memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD.

4.5 Pembahasan

Pada bab ini menguraikan secara lebih mendalam mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yang ditujukan untuk menjawab secara ilmiah permasalahan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian.

4.5.1 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Goal-Setting Theory menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. *Goal-Setting Theory* bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dengan menetapkan hasil yang diharapkan. Wisatawan yang berkunjung di suatu daerah diharapkan mampu menambah perolehan pendapatan daerah, pendapatan tersebut dapat berasal dari kegiatan wisatawan yang kemudian akan menambah perolehan pajak dan retribusi daerah. Untuk mendapatkan PAD yang telah ditetapkan maka kinerja dari dinas pariwisata dalam hal ini

mengenakan pajak dan retribusi pada tempat-tempat wisata yang menyumbang ke PAD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan hasil uji t parsial didapatkan bahwa jumlah wisatawan memperoleh signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dengan koefisien regresi 0.130 yang artinya jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini karena adanya pengenaan pajak dan retribusi akan memberikan keuntungan pada penerimaan PAD. Semakin tingginya arus kunjungan wisatawan di suatu daerah juga akan meningkatkan pendapatan daerah. Hal itu karena adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara Adapun domestic, sehingga semakin lama wisatawan berkunjung di suatu daerah semakin banyak yang akan membelanjakan uangnya. Kegiatan konsumtif ini diharapkan mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Tobing, 2021) dan (Ginting et al., 2018) yang juga menghasilkan kesimpulan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PAD.

4.5.2 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD

Goal Setting Theory mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara jumlah wisatawan dan APBD. APBD menggambarkan maksimalisasi capaian atas sasaran yang ditetapkan. Untuk mendapatkan APBD yang telah ditetapkan maka perlu adanya kinerja yang maksimal untuk memperoleh capaian target pajak dan retribusi pada tempat-tempat wisata diharapkan mampu untuk memanfaatkan potensi dari sektor pariwisata untuk menyumbang ke APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD, berdasarkan hasil uji t parsial didapatkan bahwa jumlah wisatawan memperoleh signifikansi sebesar $0.005 < 0.05$ dengan koefisien regresi 114906.537 yang artinya jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD, sehingga hipotesis kedua diterima. Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dapat memberikan keuntungan pada APBD. Bertambahnya jumlah wisatawan akan mempengaruhi jumlah APBD. Keuntungan yang di peroleh dari jumlah wisatawan berupa perolehan pendapatan yang akan berkontribusi terhadap APBD berjalan. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Sutapa et al., 2018) yang juga menghasilkan kesimpulan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD.

4.5.3 Pengaruh PAD Terhadap APBD

Penerapan *Goal Setting Theory* pada hubungan antara PAD dengan APBD yaitu capaian atas hasil perolehan pendapatan daerah yang mampu diserap ke dalam APBD. Dalam hal ini tentunya PAD memiliki peran penting dalam mencapai target APBD yang ada dalam tahun berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD, berdasarkan hasil uji t parsial didapatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memperoleh signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ dengan koefisien regresi 1271226.882 dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD, sehingga hipotesis ketiga diterima. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh suatu daerah dapat memberikan dampak terhadap APBD, karena salah satu komponen dalam susunan APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatnya perolehan pendapatan

daerah secara langsung akan memberikan efek terhadap APBD. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Sutapa et al., 2018) dan (Ramadhan et al., 2022) yang juga menghasilkan kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap APBD.

4.5.4 Pengaruh Jumlah Wisatawan Terhadap APBD Dengan PAD Sebagai

Variabel Moderating

Goal-Setting Theory dalam penelitian ini menekankan pada tujuan yang dicapai atau perolehan APBD. Jumlah wisatawan memberikan dampak pada penetapan APBD di tahun berjalan, dengan capaian jumlah wisatawan yang terpenuhi maka akan mempengaruhi APBD dengan PAD sebagai penguat pengaruh yang diberikan terhadap APBD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel moderating, berdasarkan hasil uji t parsial didapatkan bahwa jumlah wisatawan memperoleh signifikansi sebesar $0.001 < 0.05$ dengan koefisien regresi 1.1989 yang artinya jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel moderating, sehingga hipotesis keempat diterima. Jumlah wisatawan semakin bertambah dapat membuat APBD meningkat, seiring dengan penambahan perolehan PAD yang dapat membuat APBD meningkat. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian (Sutapa et al.,

2018) yang juga menghasilkan kesimpulan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD dengan PAD sebagai variabel *moderating*.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis data tentang Analisa jumlah wisatawan terhadap APBD dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut:

1. Jumlah Wisatawan terbukti berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 0.130 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini disebabkan adanya pengenaan pajak dan retribusi akan memberikan keuntungan pada penerimaan PAD. Semakin tingginya arus kunjungan wisatawan di suatu daerah juga akan meningkatkan pendapatan daerah.
2. Jumlah wisatawan terbukti berpengaruh positif terhadap APBD di Kabupaten/kota di Jawa Tengah, berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 114906.537 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0, 005 atau lebih kecil dari 0.05, sehingga hipotesis kedua diterima. Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dapat memberikan keuntungan pada APBD. Bertambahnya jumlah wisatawan akan mempengaruhi jumlah APBD. Keuntungan yang di peroleh dari jumlah wisatawan berupa perolehan pendapatan yang akan berkontribusi terhadap APBD berjalan

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap APBD di Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 1271226.882 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0.000 atau lebih kecil dari 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika suatu daerah memiliki PAD yang tinggi maka akan mampu meningkatkan APBD pada. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga akan meningkatkan realisasi APBD pada daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas, yaitu semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dan pemanfaatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang benar membuat besaran dana yang disalurkan pemerintah daerah menjadi besar, sehingga hipotesis ketiga diterima.
4. Jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap APBD dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel moderating di Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan uji t yang sudah dilakukan didapatkan hasil koefisien sebesar 1.1989 yang menunjukkan kearah positif, dengan nilai signifikansi 0.001 atau lebih kecil dari 0.05. Bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan mempengaruhi APBD, hal itu sejalan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah yang dapat memperkuat hubungan antara jumlah wisatawan dengan APBD, ketika jumlah wisatawan mengalami peningkatan akan mempengaruhi APBD daerah tersebut, dengan Pendapatan Asli Daerah yang bertambah akan memperkuat hubungan antara jumlah wisatawan yang bertambah dengan APBD yang bertambah, sehingga hipotesis keempat diterima.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

- 1) Jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan asli daerah dapat mengalami kenaikan apabila jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Jumlah wisatawan yang tinggi di suatu wilayah akan berdampak pada semakin besarnya pendapatan asli daerah. Jumlah wisatawan yang semakin meningkat akan menciptakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah tersebut dan menambah pendapatan asli daerah.
- 2) Jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif terhadap APBD di kota/kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Bertambahnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut akan meningkatkan perolehan pendapatan daerah yang akan meningkatkan APBD. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan apabila jumlah wisatawan mengalami peningkatan. Jumlah wisatawan yang tinggi di suatu wilayah akan berdampak pada semakin besarnya perolehan pendapatan daerah. Jumlah wisatawan yang semakin meningkat akan menciptakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah tersebut dan menambah pendapatan asli daerah yang akan berdampak terhadap APBD di Kabupaten/kota.
- 3) Implikasi dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan komponen yang sangat penting bagi pemerintah di kota/kabupaten

di Jawa Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

- 4) Merujuk pada hasil penelitian, peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan melalui jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota/kabupaten di Jawa Tengah .Peningkatan APBD dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur kota/kabupaten. Dengan adanya sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung maka pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah bisa menggali potensi daerah yang ada secara maksimal.

2. Implikasi Praktis

a. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wacana dalam memberikan masukan terhadap pemerintah setempat untuk menggali potensi di wilayah masing-masing terutama dalam bidang pariwisata. Dengan berkembangnya pariwisata yang ada akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap perolehan pendapatan daerah.

b. Regulator dan Stakeholder

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk pelaku bisnis dalam bidang pariwisata dan *stakeholder* terkait dalam menerapkan kebijakan di bidang pariwisata untuk mengembangkan dan manggali potensi yang ada.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan seperti peneliti dalam memperoleh data penelitian yang digunakan hanya bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran dan data dari BPS, sehingga masih terdapat unsur subjektivitas. Selain itu terdapat keterbatasan variabel penelitian yang digunakan.

5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka saran dari peneliti untuk penelitian berikutnya dimasa yang akan datang adalah:

5.4.1 Bagi Akademisi

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel penelitian misalnya jumlah objek wisata, dan retribusi daerah.
2. Diharapkan penelitian selanjutnya memperbaiki indikator yang digunakan mengukur penerimaan APBD.

5.4.2 Bagi Pemerintah

Saran kepada pemerintah melalui penelitian ini untuk lebih mengembangkan lagi pemanfaatan sektor pariwisata yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Y. (2014). *Huubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

- Ali, U. R., Manik, T., & Husna, A. (2020). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Sebagai Variabel Intervening. ... *Online Journal (SOJ) UMRAH-Ekonomi*, 368–380. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFE/article/view/610%0Ahttps://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFE/article/download/610/533>
- Alyani, F., & Siwi, M. K. (2020). Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 3(2), 212. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i2.8763>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revi).
- Baldrice, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*.
- BPKAD Jawa Tengah. (n.d.). <https://bpkad.jatengprov.go.id/>
- BPS Jawa Tengah. (n.d.). <https://jateng.bps.go.id/>
- Bungin, B. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Darsana. (2017). Pengaruh kunjungan wisatawan, pendapatan PHR, dan pendapatan retribusi obyek wisata terhadap PAD Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 6(12), 2551–2582.
- Dermawan, W. D. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2), 153–156. <https://doi.org/10.25157/je.v5i2.963>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Fatmawati, A. P., & Ria Sari, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Pulau Jawa. *Land Journal*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i1.1034>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*.
- Ginting, A. A., Pandiangan, D. Y., Napitupulu, M. S., & Sianturi, M. K. (2018). Pengaruh Jumlah Wisatawan Pada Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi Tahun 2012-2016. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 16–25.
- Hanafi Ahmad, A. (2022). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Objek Wisata, Dan Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 50–61. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.34>
- Haslindah, H., Kamase, J., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Manajemen Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di

Kabupaten Sidenreng Rappang. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2(2), 90–121. <https://doi.org/10.26618/inv.v2i2.4113>

- Judiseno. (2017). *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataaan*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan* (edisi revi).
- Nawawi, H. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang kompetitif*. Gajah Mada University Press.
- Nordiawan, D. (2012). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba empat.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010*.
- Permendagri no 13 tahun 2006. (n.d.).
- Ramadhan, M., Bisnis, E. D., Putih, U. G., Bebangka, B., Pegasing, K., & Tengah, A. (2022). *Gajah Putih Journal of Economics Review (GPJER) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bener Meriah*. 4(1), 54–63.
- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Setiawan, D., & Kurniasih, N. C. (2021). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA 55. Pengaruh Biaya Bahan Baku Dan Biaya Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih Pada Pt. Satwa Prima Utama*, 12(April), 55–64.
- Siahaan, P. M. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Sutapa, I. N., & Miati, N. L. P. M. (2018). Moderating Effect of Regional Original Revenue on the Influence of the Number of Tourists on Regional Revenue and Expenditure Budget. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 79–86. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.28>
- Tobing, M. (2021). Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Tingkat Penghunian Kamar, Dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(2), 127–139. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i2.263>
- Undang-undang. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009*.
- Undang-Undang. (2000). *Undang – undang No 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah*.
- Undang-Undang. (2003). *UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara*.
- Undang-Undang. (2004). *Undang undang 32 Tahun 2004*. www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=365
- Undang-Undang. (2009). *Undang – Undang No 10 tahun 2009 pasal 1*.
- Utary, V. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi

Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Jurnal Akuntansi UMMI, II(1).
[http://eprints.ummi.ac.id/1454/%0Ahttp://eprints.ummi.ac.id/1454/4/BAB I.pdf](http://eprints.ummi.ac.id/1454/%0Ahttp://eprints.ummi.ac.id/1454/4/BAB%20I.pdf)

UU. (2004). *UU No. 33 Tahun 2004 pada bab V (lima) nomor 1 (satu) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.*

Wahab, S. (2010). *Tourism Management.*

Widjaya, P. (2007). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II. Dalam Widjaya, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II.* Radjawali.

Winarno, W. W. (2015). *. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.*



LAMPIRAN